Dalam rilis Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Kepolisian yang diterbitkan oleh Aliansi Jurnalis Independen, terdapat banyak data dari berbagai lembaga mengenai berbagai pelanggaran hak asasi yang dilakukan oleh kepolisian. Data kontras menyebutkan setidaknya telah terjadi 198 peristiwa kekerasan yang melibatkan polisi, hanya dalam kurun waktu empat bulan di awal tahun 2024. **Bahkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mencatat terdapat 771 kasus mengenai pelanggaran Ham yang dilakukan oleh polisi.**

Belum lama ini, kasus Afif Maulana menjadi pukulan telak bagi kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Kematian anak berumur 13 tahun dalam keadaan babak belur ini jelas menjadi suatu tanda tanya besar. Bagaimana respon kepolisian?

Seperti bakwan yang sudah dingin, tidak dipedulikan. Brengseknya, Lembaga Bantuan Hukum Padang menyatakan bahwa ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menghalangi jalan penyidikan kasus. Polisi seenaknya menutup kasus tanpa penjelasan yang jelas, menolak keluarga melakukan otopsi pada jenazah korban, bahkan hingga jauh-jauh untuk memanipulasi tempat kejadian perkara dengan mengeruk sungai tempat kematian korban.

Tak hanya Afif, kepolisian juga kerap kali melakukan tindak kekerasan pada masyarakat banyak. Aparatus kepolisian seringkali hadir dalam

akan menggunakan ancaman hingga pemukulan kepada para pedagang yang enggan untuk ikut dalam cara bermain si preman, seperti membayar uang keamanan, setoran dan lain sebagainya

Akhirnya akan menimbulkan suatu pertanyaan, sebenarnya apakah polisi peduli dengan keamanan rakyat? Hal ini akan panjang jika dirunut bahwa polisi sebenarnya hanya menjalankan hukum yang ditetapkan oleh penguasa. Maka akan menjadi pertanyaan lanjutan, apakah hukum itu sendiri berpihak kepada masyarakat? Hal ini tentu akan berlanjut, sebenarnya kepentingan siapakah yang dijaga oleh negara? Fungsi negara itu apa sih?

Kembali lagi pada lagu Umay, polisi tentunya berjasa besar untuk menanggulangi kemacetan kapital yang bisa saja terjadi kalau tidak adanya ketertiban dari masyarakat yang rusuh memperjuangkan hak-haknya.

Rajin membaca jadi pandai
Malas membaca jadi polisi

APA GUNA PUNYA POLISI?

SUPLEMEN HASUTAN PEMBUBARAN KEPOLISIAN DAN SERUAN PENGHANCURAN NEGARA

OBRAK-ABRIK KOLEKTIF

Diterbitkan kembali sebagai respon terhadap kekerasan aparat saat terjadinya aksi demonstrasi

Kita telah diajarkan sejak kecil bahwa ada sekelompok orang berseragam coklat yang memiliki tugas untuk menciptakan keamanan. Lirik ceria dalam lagu Pak Polisi yang dibawakan oleh Umay Shahab mengisyaratkan perjuangan keras para pak polisi yang rela dihantam oleh terik dan badai untuk tetap tegar mengayomi keteraturan. Seragamnya yang rapi menjadi simbol pelindung yang digandrungi siswa-siswi tk dalam kegiatan baris-berbaris tiap pagi sebelum masuk kelas.

Pemahaman bahwa polisi adalah penjaga ketertiban adalah hal yang sangat lumrah dalam kehidupan bernegara. Karena bayangkan saja, jika tanpa polisi, maka akan banyak pencuri yang berkeliaran. Kita tidak akan aman berada di jalan-jalan, karena akan terus menerus merasa ketakutan bahwa harta kita akan dirampas sewaktu-waktu oleh penjahat-penjahat yang siap mengintai di tiap tikungan. Pun, tanpa polisi, kita akan kesulitan untuk mendapatkan keadilan. Polisi adalah penegak hukum. Tanpa hukum, kita akan jatuh ke dalam kekacauan dan ketidakteraturan dimana yang kuat akan memangsa yang lemah.

Tapi nyatanya, bagaimana peran polisi dalam kehidupan sehari-hari kita? Apakah pemahaman kita mengenai polisi yang menjaga dan mengayomi ketertiban sudah benar-benar bisa kita rasakan manfaatnya?

konflik-konflik yang merugikan masyarakat. Sebut saja pengusiran warga Kampung Susun Bayam pada tanggal 21 Mei lalu. Ratusan aparat gabungan kepolisian dan tentara mengepung Kampung Bayam pada pagi hari, memaksa warga untuk angkat kaki secara tidak manusiawi. Hal ini menyebabkan korban luka-luka hingga trauma psikologis yang dialami oleh anak-anak karena sirine, bentakan dan paksaan yang mereka dengar. Jauh sebelum pengusiran itu, ketua organisasi masyarakat Kampung Bayam juga mengalami penangkapan secara sewenang-wenang atas laporan yang dilontarkan oleh Jakpro.

Begitupun dengan Pakel, Dago Elos, Rempang, hingga Kanjuruhan, menggambarkan betapa kekerasan merupakan satu-satunya bahasa yang dimengerti oleh kepolisian. Akhirnya pun, kepolisian menggunakan kekerasan kepada warga negara, atas kepentingan-kepentingan yang sama sekali tidak menguntungkan warga.

Hal ini juga kembali terjadi dalam aksi demonstrasi 22 Agustus kemarin di mana pihak kepolisian mengerahkan kekerasan berlebih terhadap para demonstran. Banyak kawan-kawan yang akhirnya tumbang, mengalami luka-luka, bahkan hilang karena aksi-aksi aparat kepolisian.

Sebut saja kawan saya yang harus menjalani proses 7 jahitan di kepalanya yang sobek seetelah dipentungi oleh aparat, mahasiswa beralmamater biru yang ditarik ke dalam barisan polisi yang lalu dipukuli, hingga gas air mata dan patroli ke tempat

Tempat yang bukan seharusnya.

Jadi sebenarnya, siapa yang diuntungkan oleh adanya kepolisian? **Siapa yang diayomi oleh bapak-bapak polisi?**

Louis Althusser, seorang filsuf Prancis, menjelaskan bahwa polisi adalah alat bagi negara untuk menjalankan kepentingannya. Agar negara tetap berjalan sesuai kepentingan para pemangku kebijakan, maka sistem membutuhkan alat-alat untuk mempertahankan status quo dan memperlancar keinginannya untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Jika negara membiarkan masyarakat Rempang untuk tetap tinggal, maka bagaimana proses Proyek Strategis Nasional bisa terlaksana? Lalu bagaimana negara bisa mendapat keuntungan dari bisnis yang akan dibangunnya? Masyarakat setempat jelas menjadi pengganggu kepentingan negara, kemajuan negara. Maka untuk membuat masyarakat patuh dan manut-manut saja dengan kepentingan negara, polisi dibutuhkan untuk memukuli warga.

Polisi adalah bagian dari aparatus-aparatus represif yang bertindak untuk menghukum warga yang tidak patuh atas kepentingan sistem. Maka, produk hukum, peradilan, maupun penjara juga merupakan serangkaian alat yang digunakan oleh negara untuk melegalkan kekerasan, baik secara fisik, sistemik, maupun simbolik.

Hal ini tak ada bedanya dengan preman pasar yang menjaga keamanan wilayah. Para preman